

GIRĪNDRAWARDDHANA: RAJA-RAJA MAJAPAHIT AKHIR

Hasan Djafar
(Universitas Indonesia)

Dari prasasti Warinipitu yang berangka tahun Śaka 1369 (1447 M.), prasasti Pṭak (*OJO XCI*) dan prasasti Jiwu (*OJO XCII-XCV*) yang semuanya berasal dari tahun Śaka 1408 (1486 M.), kita mengetahui tiga orang tokoh sejarah yang mempunyai nama gelar Girīndrawarddhana. Ketiga orang tokoh sejarah tersebut ialah:

- (1) Girīndrawarddhana Dyah Wijaya Karaṇa, Bhaṭṭāra i Kliṅ pada masa pemerintahan Dyah Kṛtawijaya.
- (2) Girīndrawarddhana Dyah Raṇawijaya, Bhaṭṭāra i Kliṅ yang menjadi raja Majapahit dengan sebutan "Pāduka Śrī Mahārāja Śrī Wilwatiktapurā-Jaṅgala-Kaḍiri Prabhū Nātha."
- (3) Girīndrawarddhana Dyah Wijayakusuma Śrī Siṅhawarddhana, yang menjadi Bhaṭṭāra i Kliṅ pada masa pemerintahan Dyah Raṇawijaya.

Kenyataan tersebut di atas telah mendorong beberapa sarjana untuk menarik kesimpulan, bahwa pada periode Majapahit akhir telah muncul suatu dinasti baru raja-raja yang berkuasa di Majapahit, yaitu dinasti Girīndrawarddhana (Krom, 1923, 1931, 1938; Stutterheim, 1932, 1952; Schrieke, 1957; Zoetmulder, 1965, 1969).

Prof. N.J. Krom telah mengemukakan pendapat, bahwa pada periode Majapahit akhir telah muncul raja-raja dari dinasti Girīndrawarddhana. Dinasti ini merupakan dinasti Kaḍiri yang tampil kembali untuk merebut kekuasaan kerajaan Majapahit (Krom, 1923:83-84, 1931: 448 dan seterusnya). Pendapatnya itu merupakan penafsiran atas keterangan yang terdapat di dalam prasasti-prasasti Girīndrawarddhana. Seperti kita ketahui, di dalam prasasti Jiwu I (*OJO XCII*) dan Jiwu III (*OJO XCIV*) disebutkan adanya penyelenggaraan upacara *śrāddha* untuk memperingati dua belas tahun mangkatnya Śrī Pāduka Bhaṭṭāra riṅ Dahanapurā, Saṅ mokta iṅ Indranibhawana (Brandes, 1913: 216, 219). Krom telah mengidentifikasikan tokoh Bhaṭṭāra riṅ Dahanapurā ini dengan tokoh Bhre Daha yang di dalam Sērat Pararaton disebutkan "*añjēnēṅ ratu i śaka manawa-pañcagni-wulan, 1359*" dan "*mokta i śaka gaṇabrāhmaṇāgni-tunggal, 1386*".

Lebih lanjut lagi Krom mengemukakan, bahwa Bhaṭṭāra riṅ Dahanapurā ini adalah ayah Girīndrawarddhana Dyah Raṅawijaya. Angka tahun mangkatnya Bhre Daha yang disebutkan di dalam Pararaton itu menurut Krom tidak tepat. Angka tahun tersebut seharusnya 1396 Śaka, sehingga pada tahun Śaka 1408 ketika diadakan upacara *śrāddha* itu tepat dua belas tahun mangkatnya Bhre Daha (Bhaṭṭāra riṅ Dahanapurā). Adanya selisih waktu sepuluh tahun ini oleh Krom dianggap sebagai kekeliruan dari penulis Śerat Pararaton. Dengan berpangkal-tolak pada anggapan bahwa Bhaṭṭāra riṅ Dahanapurā adalah seorang raja Kaḍiri (Daha), Krom berpendapat bahwa Majapahit haruslah telah dijatuhkan oleh kekuasaan Hindu yang lain dari Kaḍiri (Daha), yaitu oleh dinasti Girīndrawarddhana pada tahun Śaka 1400. Dengan hal ini pula Krom menjelaskan gelar Girīndrawarddhana Dyah Raṅawijaya yang dianggapnya aneh, yaitu "*Pāduka Śrī Mahārāja Śrī Wilwatikta-Daha-Jangala-Kaḍiri*".¹⁾ Menurut Krom, *Daha* sama dengan *Kaḍiri*, *Wilwatikta* adalah nama kerajaan yang direbut, sedangkan *Daha* adalah nama tempat asalnya. Dengan demikian timbul anggapan bahwa Raṅawijaya adalah raja Kaḍiri yang telah merebut Majapahit (Krom, 1931: 448-451; 1938: 295).

Dr. W.F. Stutterheim telah mengemukakan pula pendapat yang pada dasarnya sama seperti yang dikemukakan oleh Krom. Ia berpendapat bahwa pada tahun 1486 dinasti Girīndrawarddhana yang berasal dari Kaḍiri menaiki takhta kerajaan Majapahit (Stutterheim, 1932: 82-83; 1952: 90). Pendapatnya itu agaknya didasarkan pada anggapan bahwa upacara *śrāddha* untuk memperingati dua belas tahun mangkatnya Bhaṭṭāra riṅ Dahanapurā itu bertepatan dengan saat Girīndrawarddhana naik takhta di Majapahit.

Agak berbeda dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh N.J. Krom dan W.F. Stutterheim tersebut di atas ialah pendapat yang dikemukakan oleh Dr. B.J.O. Schrieke. Menurut Schrieke Bhaṭṭāra riṅ Dahanapurā itu identik dengan Bhaṭṭāra i Kliṅ Girīndrawarddhana Dyah Wijayakaraṇa. Sedangkan Girīndrawarddhana Dyah Wijayakaraṇa adalah anak Bhre Kēliṅ, yaitu Bhre Kēliṅ yang meninggal pada tahun 1446. Dyah Wijayakaraṇa inilah yang mengadakan penyerangan ke Majapahit dan menyingkirkan keponakannya pada tahun Śaka 1390 (1468 M.). Dialah yang meninggal di kadaton pada tahun Śaka 1396 (1474 M.). Sedangkan Girīndrawarddhana Dyah Raṅawijaya

yang menamakan dirinya sebagai "Penguasa Majapahit-Daha" atau "Penguasa Kerajaan Jawa yang terdiri dari Janggala dan Kaḍiri," dan Girīndrawarddhana Dyah Wijayakusuma, keduanya adalah anak Girīndrawarddhana Dyah Wijayakaraṇa (Schrieke, 1957:59 dan seterusnya). Adanya sebutan *Bhaṭṭāra i Kliṅ* yang dipakai oleh ketiga Girīndrawarddhana itu telah mendorong Schrieke untuk mengemukakan pendapatnya lebih jauh lagi, yaitu bahwa Girīndrawarddhana adalah nama dinasti baru raja-raja Majapahit akhir, yang merupakan "*Ruling Family of Kēliṅ*" (Schrieke, 1957:61).

Ketika memberikan penjelasan mengenai sebutan "*girīndrawarṣaja*" yang terdapat di dalam *maṅgala* kakawin Śiwarātrikalpa, Prof. Dr. P.J. Zoetmulder mengemukakan pula pendapatnya, bahwa Girīndrawarddhana adalah nama dinasti raja-raja Majapahit akhir (Zoetmulder, 1965:206; 1969:64).

Disamping pendapat para sarjana tersebut di atas masih ada sebuah pendapat lain, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Dr. J.G. de Casparis. J.G. de Casparis tidak membenarkan anggapan yang menyatakan bahwa Girīndrawarddhana adalah nama dinasti baru raja-raja Majapahit akhir. Menurut de Casparis, anggapan mengenai penaklukan Majapahit oleh Kaḍiri pada tahun 1478 itu haruslah hilang dari catatan sejarah kita, karena pendapat tersebut bertumpu pada kesalahan penafsiran mengenai tokoh Bhaṭṭāra riṅ Dahanapurā yang dilakukan oleh Krom (De Casparis, 1961 : 158).

Di dalam tulisannya Schrieke telah mengemukakan pendapat bahwa Girīndrawarddhana Dyah Raṇawijaya dan Girīndrawarddhana Dyah Wijayakusuma adalah anak Bhre Kēliṅ. Girīndrawarddhana Dyah Wijayakaraṇa. Sedangkan Dyah Wijayakaraṇa tersebut adalah anak Bhre Kēliṅ, yang meninggal pada tahun 1446, dan Bhre Kēliṅ tersebut adalah cucu Wikramawarddhana (Schrieke, 1957:64, 66). Dari kakawin Nāgarakṛtāgama dan Śerat Pararaton kita mengetahui, bahwa Wikramawarddhana adalah buyut Śrī Kṛtarājasa Jayawarddhana. Jadi menurut genealoginya ketiga Girīndrawarddhana tersebut adalah keturunan langsung dari Śrī Kṛtarājasa Jayawarddhana. Dengan demikian maka jelaslah, bahwa berdasarkan genealogi yang disusun oleh Schrieke sendiri, pendapatnya mengenai Girīndrawarddhana sebagai nama dinasti baru raja-raja Majapahit akhir itu tidaklah tepat.²⁾

Seandainya Girīndrawarddhana merupakan nama suatu dinasti, se-

harusnya kita telah mendapatkan istilah "*Girīndrawarddhana*" yang berarti "Dinasti Girīndrawarddhana" di dalam sumber-sumber sejarah. Akan tetapi sampai saat ini kita tidak pernah mengenal istilah tersebut dari sumber-sumber sejarah yang ada. Hal ini berlainan sekali misalnya dengan dinasti Śailendra. Seperti kita ketahui di dalam prasasti Kalasan yang berangka tahun Śaka 700 disebutkan istilah "*Śailendrawaṅśa*".³⁾ Jadi adanya dinasti Śailendra itu kita ketahui dari sumber sejarah. Lebih dari empat puluh tahun yang lalu J. Przyluski telah mempunyai dugaan, bahwa Śailendra haruslah merupakan nama seorang tokoh yang menjadi nenek moyang atau pendiri dinasti Śailendra (Przyluski, 1935: 30). Dugaan Przyluski ini tidaklah meleset. Kini telah terbukti, bahwa Śailendra adalah nama orang. Berdasarkan temuan sebuah prasasti batu berbahasa Melayu Kuna di Sojomerto (Pekalongan, Jawa Tengah), kita mengetahui seorang tokoh sejarah bernama Dapūnta Selendra, yang merupakan *Waṅśakara* atau pendiri dinasti Śailendra (Boechari, 1966).

Pemakaian nama Girīndrawarddhana sebagai nama gelar oleh tiga orang raja Majapahit akhir memang merupakan suatu hal yang sangat menarik dan patut mendapat perhatian. Kehadiran tiga tokoh Girīndrawarddhana tersebut dalam Sejarah Indonesia Kuna dengan jelas disebutkan di dalam prasasti-prasasti yang berasal dari jaman Majapahit akhir. Dari sumber-sumber yang lain mungkin masih dapat diketahui beberapa nama raja Majapahit yang mempunyai nama gelar atau sebutan yang sama artinya dengan "girīndrawarddhana."

Dari prasasti Warinipitu kita mengetahui, bahwa yang menjadi Bhaṭṭāra i Wēṅkēr pada masa pemerintahan Dyah Kṛtawijaya adalah Girīśawarddhana Dyah Suryawikrama.⁴⁾ Berdasarkan kesamaan arti antara kata "*girīśa*" dan "*girindra*" dapatlah kiranya dikemukakan bahwa Girīśawarddhana pun mempunyai arti yang sama dengan Girīndrawarddhana.⁵⁾

Dari prasasti Pamintihan yang berangka tahun Śaka 1395 (1473 M.),⁶⁾ kita mengetahui bahwa raja yang mengeluarkan prasasti tersebut ialah Dyah Suraprabhāwa Śrī Siṅhawikramawarddhana. Di dalam prasastinya itu ia diberi sebutan "*Śrī Giripatiprasūtabhūpatiketubhūta*", yang berarti "yang menjadi pemimpin (yang termasuk paling utama) dari raja-raja keturunan Tuan-Gunung" (Zoetmulder, 1965: 206; 1969:64). Prof. P.J. Zoetmulder telah mengemukakan adanya kesamaan arti dari sebutan yang dipakai oleh Śrī Siṅhawikramaward-

dhana dengan arti sebutan yang dipakai oleh Śrī Ādisuraprabhāwa yang disebutkan di dalam *mangala* kakawin Śiwarātrikalpa.⁷⁾ Dari *mangala* kakawin Śiwarātrikalpa terdapat kalimat yang berbunyi: "tan lyan sry ādisuraprabhāwa sira bhūpati sapala girīndrawaṅśaja". Oleh Zoetmulder kalimat tersebut diterjemahkan dengan "tiada lain adalah Sri Ādisuraprabhāwa, seorang radja jang memang telah se-pantasnja mendjadi keturunan wangsa-Girīndra." Atas dasar kesamaan arti sebutan-sebutan tersebut Zoetmulder kemudian mengidentifikasi tokoh Śrī Ādisuraprabhāwa yang disebutkan di dalam *mangala* kakawin Śiwarātrikalpa dengan tokoh Dyah Suraprabhāwa Śrī Siṅhawikramawarddhana yang disebutkan di dalam prasasti Pamintihan (Zoetmulder, 1965:206; Teeuw *et al.*, 1969:15, 64-65; lihat pula: Muusses, 1929:213-214; Krom, 1931:448, 450).

Zoetmulder telah menunjukkan pula adanya nama-nama sebutan tokoh-tokoh lain yang ternyata mempunyai arti yang dekat sekali dengan arti "girīndrawarddhana", yaitu: Girīndrawiyawaṅśaja dari *mangala* kakawin Pārthayajña dan Śrī Śurawīryawaṅśaja dari *mangala* kakawin Subadrāwīwāha. Menurut Zoetmulder, "wīrya" = "prabhāwa", jadi Śurawīryawaṅśaja haruslah keturunan Suraprabhāwa dan Girīndrawiyawaṅśaja barangkali keturunan Suraprabhāwa pula (Zoetmulder, 1965:209).

Dari Sērat Pararaton kita mendapatkan keterangan, bahwa sepeninggal Rājasawarddhana (Sanj Sinagara) pada tahun Śaka 1375, selama tiga tahun tidak ada raja. Barulah pada tahun Śaka 1378, Bhre Wēṅkēr menjadi raja dengan gelar Bhra Hyaṅ Purwwawīśeṣa. Ia meninggal pada tahun Śaka 1388 dan didharmakan di Puri (Brandes, 1920:40). Di muka telah kami kemukakan, bahwa prasasti Warīṅin-pitu menyebutkan pula seorang Bhaṭṭāra i Wēṅkēr, yaitu Girīśawarddhana Dyah Suryawikrama. Kita telah mengetahui pula bahwa prasasti Warīṅin-pitu tersebut dikeluarkan pada tahun Śaka 1369, pada masa pemerintahan Dyah Kṛtawijaya. Mengingat jarak waktu antara tahun Śaka 1369 dan 1378 tidak terlampau jauh dan untuk masa sekitar tahun Śaka 1369 – 1378 kita tidak mendapatkan atau mengetahui adanya tokoh Bhre Wēṅkēr yang lain lagi, mungkin sekali Bhre Wēṅkēr yang disebutkan di dalam Pararaton menggantikan Rājasawarddhana itu tidaklah lain dari Bhaṭṭāra i Wēṅkēr yang disebutkan di dalam prasasti Warīṅin-pitu. Dengan perkataan lain mungkin sekali Bhra Hyaṅ Purwwawīśeṣa itu identik dengan Girīśawarddhana Dyah

Suryawikrama.

Telah kami kemukakan pula, bahwa Girīśawarddhana mempunyai kesamaan arti dengan Girīndrawarddhana. Seandainya dugaan kami tentang identifikasi Bhra Hyaṅ Purwwawiśeṣa dengan Girīśawarddhana itu benar, maka Bhra Hyaṅ Purwwawiśeṣa yang menjadi raja di Majapahit pada tahun Śaka 1378 – 1388 (1456 – 1466 M.) itu tentulah juga merupakan salah seorang yang lahir dari kula-warga "Tuan Gunung", Girīndrawaṅśa.

Dengan demikian sekarang kita telah mendapatkan sekelompok penguasa dari periode Majapahit akhir yang ternyata mereka itu semuanya mempunyai hubungan nama yang sangat erat. Nama-nama mereka ternyata semuanya menunjuk kepada nama dinasti Girīndra (*Girīndrawaṅśa*). Akan tetapi kenyataan ini tidaklah meyakinkan kita untuk dapat menyetujui pendapat, bahwa kelompok penguasa tersebut merupakan kelompok penguasa di Majapahit dari dinasti baru raja-raja Majapahit akhir. Lebih-lebih hal itu tidak meyakinkan kita untuk menyetujui pendapat tentang munculnya kembali penguasa-penguasa dari dinasti Kaḍiri yang sejak awal pembentukan kerajaan Majapahit telah ditumpas oleh Raden Wijaya (Śrī Kṛtarājasa Jayawarddhana).

Anggapan tentang adanya dinasti baru raja-raja Majapahit akhir yang berasal dari Kaḍiri dari segi politik menjumpai keberatan-keberatan yang tidak mudah untuk dilalui. Seperti telah disinggung di muka, menurut J.G. de Casparis, anggapan tersebut berpangkal pada uraian N.J. Krom mengenai penafsiran dan identifikasi tokoh Bhaṭṭāra riṅ Dahanapurā. Menurut hemat kami, dalam memberikan penafsirannya itu Krom telah melupakan suatu hal yang sangat penting dan harus diperhatikan di dalam penelitian mengenai Sejarah Indonesia Kuna, khususnya periode Majapahit akhir, yaitu segi-segi struktural dari kerajaan Majapahit.⁸⁾ Dari penelaahan terhadap sumber-sumber sejarah seperti Śērat Pararaton, kakawin Nāgarakṛtāgama dan beberapa prasasti yang berasal dari jaman Majapahit, kita mengetahui bahwa kerajaan Majapahit pada waktu itu telah memiliki sistim dan struktur politik yang berlandaskan konsepsi *kosmogoni*. Dari sumber-sumber tersebut kita mengetahui pula bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan bagaimana pula keadaan struktur perwilayahan di kerajaan Majapahit pada waktu itu. Di bawah Śrī Mahārāja Majapahit kita dapati sejumlah penguasa atau raja-raja daerah. Mereka itu masing-

masing memerintah di suatu negara daerah dengan sebutan *Pāduka Bhaṭṭāra* atau *Bhre (Bhra i)*. Raja-raja daerah ini ternyata pula mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan raja yang memerintah di Majapahit. Negara-negara daerah yang masing-masing diperintah oleh seorang *Pāduka Bhaṭṭāra* itu pun ternyata merupakan wilayah-wilayah atau daerah-daerah kerajaan yang secara keseluruhan membentuk kerajaan Majapahit (Schrieke, 1957; Teeuw *et al.*, 1969:15).

Gambaran yang jelas mengenai segi-segi struktural, khususnya struktur birokrasi dan struktur perwilayahan, di kerajaan Majapahit seperti itu dapat memberikan pandangan-pandangan baru dalam mengungkapkan beberapa masalah politik yang terjadi pada periode Majapahit akhir, khususnya masalah-masalah yang bertalian dengan perebutan kekuasaan antar keluarga raja. Dengan berpegang pada gambaran mengenai keadaan struktur politik yang demikian ini maka peristiwa "penyerangan" ke Majapahit ("*yūddha lawaniṅ Majapahit*") yang dilakukan oleh "raja Kaḍiri" seperti disebutkan di dalam salah satu prasasti Girīndrawarddhana itu tentulah harus ditafsirkan sebagai suatu "pemberontakan" dari salah seorang raja daerah terhadap penguasa di Majapahit dalam rangka perebutan kekuasaan antar keluarga raja-raja Majapahit.

Menurut pendapat kami dipakainya nama Girīndrawarddhana sebagai nama gelar oleh beberapa raja Majapahit akhir tidaklah *per se* menunjukkan adanya suatu dinasti baru, dinasti Girīndrawarddhana. Bahkan berdasarkan penelaahan genealogis kami melihat adanya petunjuk yang membawa kami kepada kesimpulan, bahwa raja-raja Majapahit akhir yang menggunakan nama gelar Girīndrawarddhana itu semuanya masih keturunan dari Ken Arok alias Śrī Raṅgah Rājasa Bhaṭṭāra Saṅ Amūrwwabhūmi, yaitu seorang tokoh *waṅśakara* atau pendiri dinasti Rājasa (*Rājasawaṅśa*) yang dikenal pula dengan sebutan dinasti Girīndra (*Girīndrawaṅśa*).

Dengan demikian sampailah kami pada suatu kesimpulan bahwa Girīndrawarddhana bukanlah nama dinasti -- lebih-lebih lagi nama suatu dinasti baru -- raja-raja Majapahit akhir. Menurut hemat kami Girīndrawarddhana hanyalah *nama gelar* yang dipakai oleh raja-raja Majapahit akhir penerus dinasti Girīndra atau dinasti Rājasa. Dengan perkataan lain dapatlah dikemukakan pula, bahwa hanya ada satu

L

dinasti raja-raja yang berkuasa di Majapahit, yaitu dinasti Girindra (*Girindrawaṅṣa*) atau dinasti Rājasa (*Rājasawaṅṣa*).

CATATAN

- 1) N.J. Krom berpegang pada pembacaan prasasti Jiwu I yang dilakukan oleh J.L.A. Brandes (lihat: Brandes, 1913:216). Kalimat tersebut sebenarnya berbunyi: "*Pāduka Śrī Mahārāja Śrī Wilwatiktapurā-Jaggala-Kaḍiri*."
- 2) Lihat skema genealogi "The Rulers of Majapahit" yang disusun oleh Schrieke di dalam bukunya *Indonesian Sociological Studies*, II, 1957:60-61.
- 3) Pada baris kelima prasasti Kalasan terbaca: "..... *Sailendrawaṅṣarilakasya/sailendrarājagurubhis*", sedangkan pada baris ke delapan terbaca: "..... *rājasihena/sailendrawaṅṣabhūpair*" (Bosch, 1928:61).
- 4) Lihat: Muhammad Yamin, *Pertulisan Widjaja-Parakrama-Wardana dari Surodakan (Kediri)*, 1962:7-8, 20.
- 5) Telah menjadi pendapat umum, bahwa *Girīśa* adalah nama lain untuk *Śiwa*, yang dikenal pula dengan sebutan-sebutannya *Girindra*, *Girinātha*, *Giripati* dan *Parwatanātha*, yang semuanya itu berarti "*Raja Gunung*" atau "*Tuan Gunung*" (Kern, 1919:24; Zoetmulder, 1957:65; Pigeaud, 1962, IV:4; Berg, 1965:106-107, 1969:75-76; Teeuw, et al., 1969:322; Supomo, 1972:284-285).
- 6) Lihat: F.D.K. Bosch, "De Oorkonde van Sendang Sedati", *OV*, 1922:22-27.
- 7) Mengenai kakawin *Śiwarātrikalpa*, lihat: A. Teeuw et al., *Śiwarātrikalpa of Mpu Tanakun*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1969 (*Bibliotheca Indonesica*, 3).
- 8) Penggunaan metode pendekatan struktural pada sejarah Indonesia telah berhasil mengungkapkan strukturbirokrasi, struktur masyarakat, struktur perwilayahan dan sebagainya. Dengan mengetahui segi-segi struktural ini dapatlah dihindari bahaya anakronisme dan kesalahan interpretasi. Tentang masalah ini lihat: (a) Sartono Kartodirdjo, "Beberapa Masalah Teori dan Metodologi Sedjarah Indonesia", *Lembaran Sedjarah*, no. 6, 1970; (b) Boechari, "A Preliminary Note on the Study of Old-Javanese Civil Administration", *MISI*, I (2), 1963:122-133; (c) Boechari, "Epigraphy and Indonesian Historiography", di dalam Soedjatmoko et al., *An Introduction to Indonesian Historiography*, 1965:47-73, khususnya hal. 69-70.